



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan su
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA
HARAPAN DIKECAMATAN PULAU MERBAU KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI**

SKRIPSI

Oleh:

RAFIZAR
11475104863



UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2019

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan su
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA
HARAPAN DIKECAMATAN PULAU MERBAU KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai syarat untuk menyelesaikan tugas akhir
Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru*

Oleh:

RAFIZAR
11475104863



UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2019

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DIKECAMATAN PULAU MERBAU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Oleh :
Rafizar
NIM : 11475104863

Penanggulangan kemiskinan merupakan masalah yang harus segera diatasi oleh pemerintah untuk segera dituntaskan dan diputus rantai penyebabnya. Penanggulangan kemiskinan saat ini masih berorientasi material sehingga keberlanjutannya sangat tergantung pada ketersediaan anggaran dan komitmen pemerintah. Langkah kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengentaskannya salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Kesejahteraan merupakan tujuan akhir dari PKH, yaitu meningkatkan kualitas hidup Keluarga sangat Miskin (KSM) dengan mengakses layanan kesehatan dan pendidikan. Dengan dilaksanakannya PKH diharapkan dapat meningkatkan taraf kehidupan sosial ekonomi, pendidikan, serta kesehatan masyarakat terutama pada kelompok masyarakat miskin. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk mencari unsur-unsur, ciri-ciri, sifat-sifat suatu fenomena. Jenis data dan analisisnya yaitu data kualitatif yang merupakan data berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar. Pengumpulan data dengan cara observasi, studi kepustakaan, dokumentasi dan wawancara selanjutnya dilakukan analisis data sehingga dapat dilakukan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil sosialisasi program keluarga harapan di kecamatan pulau merbau telah dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan kebijakan dan penyusunan anggota disetiap kabupaten, kecamatan maupun desa atau kelurahan sesuai dengan tugas dan kewenangan sesuai dengan SOP yang digunakan mengacu pada pedoman umum PKH. Sosialisasi awal sudah dilaksanakan dengan baik, penyaluran bantuan kadang tidak tepat waktu, pemutakhiran data selalu dilakukan pendamping setiap pertemuan, verifikasi pendidikan dan kesehatan sudah berjalan dengan baik, sistem pengaduan masyarakat sudah dilakukan dengan baik, komunikasi sudah dilakukan dengan baik, sumber daya peralatan sudah cukup, sumber daya informasi dan kewenangan sudah jelas, dan disposisi sikap dan perilaku pelaksana sudah baik. Kemiskinan yang perlu diperhatikan pemerintah di kecamatan pulau merbau yaitu kemiskinan yang berbentuk absolut. Program keluarga harapan merupakan program bantuan berbasis bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Bantuan PKH di Kecamatan Pulau Merbau berupa uang tunai dan motivasi untuk mengubah taraf hidup Penerima bantuan.

Kata kunci : Penanggulangan Kemiskinan, Program Keluarga Harapan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.5. Sistematika Penelitian	11
BAB II TINJAUAN TEORETIS	
2.1 Pengertian kebijakan publik	13
2.2 Konsep Implementasi	19
2.3 Program keluarga harapan	22
2.4 Konsep kemiskinan	29
2.5 Pandangan islam tentang PKH.....	30
2.6 Kajian terdahulu	33
2.7 Definisi konsep	36
2.8 Konsep operasional	37
2.9 Kerangka fikir	39
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	41
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian	42
3.3 Jenis dan Sumber Data	42

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4 Subjek Penelitian	42
3.5 Teknik Pengumpulan Data	44
3.6 Analisis Data	45

BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1 Kondisi Geografis	48
4.2 Kondisi Demografis	49
4.3 Kondisi Sosial Ekonomi	50

BAB V PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

5.1 Pelaksanaan PKH di Kecamatan Pulau Merbau	52
5.2.1 Pelayanan Uang Tunai	52
5.2.2 Pelayanan Kesehatan	55
5.2.3 Pelayanan Pendidikan	60
5.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan	64
5.2.1 Faktor Pendukung	65
5.2.2 Faktor Penghambat	68

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan	70
6.2 Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kartu Keluarga.....	5
Tabel 1.2 Jumlah penduduk miskin berdasarkan desa tahun 2018	6
Tabel 1.3 Jumlah RTSM Kecamatan Pulau Merbau	7
Tabel 1.4 Jumlah Keluarga Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018.....	7
Tabel 1.5 Indeks dan komponen bantuan.....	8
Tabel 2.1 Kajian terdahulu	34
Tabel 2.2 Indikator Penelitian	37
Tabel 3.1 Subjek Penelitian	44
Tabel 4.1 Jumlah siswa dan sekolah kecamatan Pulau Merbau	49
Tabel 4.2 Penghasilan pertanian masyarakat Kec. Pulau Merbau	51

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji Syukur penulis ucapkan kepada kehadiran Allah SWT, dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang di tulis dalam bentuk Skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan judul: “**Analisis Pelaksanaan Program keluarga Harapan Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti**” Ini penulis tulis dan di ajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelas Sarjana Strata Satu (S1). Sholawat serta selalu tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kealam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian Skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Yth :

1. Ayahanda tercinta Syamsu K dan Ibunda tersayang Railah, yang tak pernah bosan dan lelah mendo'akan menasehati demi mewujudkan kesuksesan buat anandanya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Dr. Kamaruddin S.Sos., M.Si selaku Ketua jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Ibu Weni Puji Astuti, S.Sos, M.KP Sekretaris jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
6. Ibuk Abdiana Ilosa S.AP, MPA selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan pengarahan dalam penyelesaian skripsi penulis.
7. Bapak Muslim S.Sos, M.Si selaku penasehat akademis penulis di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
8. Bapak/Ibu Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
9. Kepala Tata Usaha dan seluruh staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan administrasi dalam penulisan Skripsi ini.
10. Kepala Perpustakaan UIN Suska dan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah membantu penulis menyelesaikan pinjaman buku dalam penulisan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Meranti Dan UPPKH Kecamatan Pulau Merbau.

Akhirnya sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini semoga menjadi amal Sholeh disisi Allah SWT. Aamiin...

Pekanbaru, 29 Juli 2019

Ttd,

Rafizar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan masyarakat adalah cita-cita luhur dari setiap bangsa. Kemerdekaan bukan saja bermakna kebebasan dari penjajah, lebih dari itu adalah tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Terbebas dari belenggu kemiskinan. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tertuang amanat konstitusi bahwa upaya penanggulangan kemiskinan merupakan perlindungan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sebagai negara berkembang, Indonesia masih dalam proses pembangunan khususnya di bidang ekonomi. Namun, krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 telah memurukkan Indonesia ke dalam kemiskinan yang lebih serius dan berakibat pada penurunan kualitas kehidupan masyarakat seperti rendahnya tingkat kesehatan, penurunan gizi, dan keterbelakangan pendidikan.

Di Indonesia, masalah kemiskinan masih menjadi sorotan utama terkait dengan usaha-usaha pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Kemiskinan dan pengangguran bagaikan setumpuk gunung es yang

harus segera terpecahkan. Fenomena-fenomena tersebut sebenarnya tidaklah berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan terhubung satu sama lain. Para pemerhati sosial, politik, ekonomi dan budaya telah mengemukakan keprihatinannya, mereka sadar bahwa tanpa keteladanan dan upaya yang serius para pemangku kebijakan maka fenomena tersebut akan membawa Bangsa dan Negara kehilangan arah dan rakyatpun lama-kelamaan tidak mampu menanggung beban yang bertubi-tubi. (Wisnu Indrajid,2014:25)

Kemiskinan merupakan fenomena dan masalah sosial yang terus menerus dikaji dan menjadi perhatian pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu faktor penyebab ketertinggalan dan penghambat dalam pembangunan suatu bangsa adalah tingginya angka kemiskinan. Kemiskinan dapat menimbulkan dampak yang bersifat menyebar (*multiplier effects*) terhadap tatanan kemasyarakatan secara menyeluruh. Kemiskinan juga merupakan muara dari masalah sosial lainnya.

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan yang terdapat pada Pasal 1 Ayat 1 adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH (Permensos Nomor 1 tahun 2018). Program Keluarga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harapan (PKH) merupakan program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah sejak tahun 2007 yang dikatakan sebagai program unggulan nomor satu dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Program Keluarga Harapan ini dijalankan sebagai pelaksana dari UU No 40 Tahun 2014 Tentang Jaminan Sosial, Inpres No 3 Tahun 2010 Tentang Program Penanggulangan Pembangunan yang Berkeadilan dan Perpres No 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Program Keluarga Harapan (PKH) ini merupakan program penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan tunai kepada keluarga miskin berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan. Tujuan dari Program Keluarga Harapan ini adalah untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan diantara masyarakat yang merupakan keluarga atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.

Dalam Islam, jaminan sosial berasal dari kata *takaful* yang menunjukkan makna “pengharusan” dan “tanggung jawab”, karena *takaful* merupakan bentuk interaktif dari kata *kafala*. Dikatakan, *takkafaltu bisy syai’I*, artinya aku mengharuskan diriku kepadanya, dan aku akan menghilangkan darinya keterlantaran. Sedangkan kata sosial disebutkan dalam *Islam* dengan kata *ijtima’I* yang berarti masyarakat. Maksudnya, perkumpulan sekelompok manusia yang dipadukan oleh satu tujuan. Jadi dapat disimpulkan didalam islam bahwasanya

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

sangat mengharuskan memberikan bantuan kepada mereka atau orang yang kurang mampu yang sudah mengerahkan seluruh tenaganya namun belum bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik. (Asmuni Shalihan Zamakhsyari, 2010:285)

Kabupaten Kepulauan Meranti yang merupakan kabupaten dengan bentuk daerah geografisnya merupakan daerah kepulauan dari Provinsi Riau yang dinyatakan daerah termiskin di Provinsi Riau. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Sekretariat Wakil Presiden RI, Muhammad Arif Tasrif, memaparkan bahwa dalam catatan negara salah satu daerah di Riau, yakni Kabupaten Kepulauan Meranti masih tergolong daerah termiskin di Riau. Menurutnya, persentase masyarakat miskin di Kepulauan Meranti sangat tinggi alasan adalah karena kabupaten yang beribukotakan di Selatpanjang ini masih tergolong ke dalam wilayah Kecamatan dengan tingginya ketimpangan sosial. Karena itu, persoalan tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah untuk mengatasinya (Media Cakplah : 2018).

Melihat kondisi Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan daerah yang tingkat kemiskinan tertinggi di Riau, maka terlihatlah kondisi daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti terutama Kecamatan Pulau Merbau yang terdiri dari sebelas Desa yang saat ini sedang mengalami permasalahan ketimpangan sosial yaitu kemiskinan. Dalam hal ini usaha pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan tersebut dilakukan dengan cara memberikan bantuan sosial berupa

Program Keluarga Harapan (PKH) kepada masyarakat miskin, akan tetapi implementasi yang tidak begitu jelas menimbulkan permasalahan terhadap pengurangan tingkat kemiskinan di Kecamatan Pulau Merbau. Hal tersebut dapat dilihat dari kurangnya sosialisasi dilapangan oleh pendamping dan juga penyaluran bantuan PKH yang tidak tepat sasaran.

Adapun Menurut data Daftar Isian Penduduk Kecamatan Pulau Merbau berjumlah ± 16.856 Jiwa, atau 4.144 KK, penduduk laki-laki sebanyak ± 8.524 Jiwa dan Perempuan sebanyak ± 8.332 Jiwa. Adapun jumlah penduduk di setiap desa di Kecamatan Pulau Merbau, sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kartu Keluarga tahun 2018

No	Desa	Jumlah Penduduk dan KK			
		KK	Pria	Wanita	Total
1	2	3	4	5	6
1	Renak Dungun	518	1050	1038	2088
2	Semukut	562	1177	1089	2266
3	Padang Kamal	254	340	614	954
4	Teluk Ketapang	253	478	449	927
5	Ketapang Permai	240	501	454	955
6	Batang Meranti	296	668	620	1288
7	Centai	469	1024	952	1976
8	Tanjung Bunga	241	583	533	1116
9	Kuala Merbau	661	1422	1380	2802
10	Baran Melintang	475	874	829	1703
11	Pangkalan Balai	175	407	374	781
Jumlah		4144	8524	8332	16856

Sumber : Unit pelaksanaan PKH (UPPKH) Kec. Pulau Merbau

Dari jumlah penduduk tersebut yang tergolong penduduk miskin sebesar 39%, sisanya tergolong kelompok sedang dan kaya. Penyebaran jumlah penduduk dan jumlah penduduk miskin di setiap desa adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2

Jumlah penduduk miskin berdasarkan desa tahun 2018

No	Desa / Kelurahan	Jumlah Penduduk		Penduduk Miskin
		KK	Jiwa	KK
1	Renak Dungun	518	2088	163
2	Semukut	562	2266	146
3	Padang Kamal	254	954	91
4	Teluk Ketapang	253	927	156
5	Ketapang Permai	240	955	145
6	Batang Meranti	296	1288	151
7	Centai	469	1976	152
8	Tanjung Bunga	241	1116	157
9	Kuala Merbau	661	2802	215
10	Baran Melintang	475	1703	123
11	Pangkalan Balai	175	781	113
JUMLAH		4.144	16.856	1.512

Sumber : Unit pelaksanaan PKH (UPPKH) Kec. Pulau Merbau

Adapun jumlah RTSM/KSM peserta PKH di Kecamatan Pulau Merbau mulai tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3
Jumlah RTSM Kec. Pulau Merbau Penerima Bantuan PKH

No	Tahun	Jumlah RTSM/KSM
1	2013	2.429
2	2014	2.250
3	2015	2.032
4	2016	1.921
5	2017	1.793
6	2018	1.512

Sumber data: Unit Pelaksana PKH (UPPKH) Kac. Pulau Merbau

Adapun jumlah Keluarga dan RTSM/RTM di Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4
Jumlah Keluarga Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018

No	Kecamatan	Jumlah Keluarga	Jumlah RTSM/KSM
1	Tebing Tinggi	12.704	5.982
2	Tebing Tinggi Timur	2.758	1.131
3	Tebing Tinggi Barat	3.870	1.218
4	Rangsang	4.650	1.542
5	Rangsang Barat	4.105	1.261
6	Rangsang Pesisir	4.060	1.993
7	Merbau	3.360	1.151

8	Pulau Merbau	4.105	1.512
9	Tasik Putri Puyu	3.900	1.349

Sumber Data : Unit Pelaksanaan PKH (UPPKH) Kac. Pulau Merbau

Besaran bantuan untuk setiap RTSM peserta PKH tidak disamaratakan, tidak seperti BLT. Akan tetapi mengikuti skenario bantuan yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.5

Indeks dan kompoen bantuan tahun 2018

Skema Bantuan	Indeks Bantuan Per-RTM / Tahun
Bantuan tetap	Rp. 5.00.000
Bantuan bagi peserta PKH dengan komponen :	
1. Ibu hamil/menyusui/nifas, anak usia dibawah 6 tahun	Rp. 1.000.000
2. Anak SD dan sederajat	Rp. 4.50.000
3. Anak SMP dan sederajat	Rp. 7.50.000
4. Anak SMA dan sederajat	Rp. 1.000.000

Sumber : Unit pelaksanaan PKH (UPPKH) Kec. Pulau Merbau

Dari uraian diatas Maka dari itu peneliti sangat tertarik untuk meneliti Program Keluarga Harapan atau disebut PKH yang merupakan program unggulan dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. dengan judul penelitian “ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN PULAU MERBAU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI”. Penelitian ini mengharapkan pemerintah mampu melaksanakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tugas mereka dengan baik. Sehingga program bantuan *sosial* tersebut benar-benar dapat mengatasi penanggulangan kemiskinan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang masalah sebagaimana yang di kemukakan diatas, maka penulis dalam penelitian ini menerapkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti?
2. Apa saja Faktor-faktor penghambat Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti?

1.3 Tujuan Penelitian

Apabila Problematika penelitian menunjukkan pertanyaan mengenai apa yang tidak diketahui oleh peneliti untuk dicari jawabannya melalui kegiatan penelitian (Arikunto, 2013:15) maka tujuan penelitian menyebutkan tentang apa yang ingin diperoleh. Sehingga tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti?
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor penghambat Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, umumnya bagi pengembangan ilmu Administrasi Negara khususnya dalam Implementasi dan Penanggulangan Kemiskinan.
- b. Untuk kepentingan akademis, dalam hal ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan memperluas wawasan serta merupakan salah satu syarat dalam menempuh Gelar Strata Satu (SI) di Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim.

2. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan khususnya Kecamatan Pulau Merbau dan bagi pemerintah dalam rangka Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).

3. Bagi Pihak Lain

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulisan hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian dan bahan pembanding serta dasar lebih lanjut.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan Skripsi perlu disusun dengan menggunakan sistematika tertentu untuk mempermudah dalam pengkajiannya. Penulisan dalam skripsi ini secara garis besar adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN TEORETIS

Bab ini menguraikan teori-teori yang akan dijadikan acuan dalam menganalisis permasalahan pada penelitian ini. Dalam hal ini penulis menggunakan hasil penelitian yang relevan berisi penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan penelitian sebelumnya.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, jenis dan sumber data, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisi gambaran umum lokasi tempat dilakukan penelitian

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum obyek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan dari serangkaian pembahasan, saran-saran, daftar pustaka serta lampiran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORETIS

2.1 Pengertian Kebijakan Publik

Pada dasarnya banyak batasan atau definisi apa yang dimaksud dengan kebijakan publik (*public policy*) dalam literatur-literatur ilmu politik. Masing-masing definisi tersebut memberi penekanan yang berbeda-beda. Perbedaan ini timbul karena masing-masing ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Sementara di sisi yang lain, pendekatan dan model yang digunakan oleh para ahli pada akhirnya juga akan menentukan bagaimana kebijakan publik tersebut hendak didefinisikan (Winarno, 2007: 16). Definisi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye (1975), dalam Syafiie (2006: 105) menyatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan (mendiamkan) sesuatu itu (*whatever government choose to do or not to do*)”.

Dye dalam Harbani Pasolong (2008) mengemukakan bahwa bila pemerintah mengambil suatu keputusan maka harus memiliki tujuan yang jelas, dan kebijakan publik mencakup semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Sementara Carl Friedrich (dalam Winarno 2007: 17) mengemukakan bahwa:

Kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Namun demikian, satu hal yang harus diingat dalam mendefinisikan kebijakan, adalah bahwa pendefinisian kebijakan tetap harus mempunyai pengertian mengenai apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah, daripada apa yang diusulkan dalam tindakan mengenai suatu persoalan tertentu. Definisi mengenai kebijakan publik akan lebih tepat bila definisi tersebut mencakup pula arah tindakan atau apa yang dilakukan dan tidak semata-mata menyangkut usulan tindakan. Winarno mengemukakan bahwa definisi yang lebih tepat mengenai kebijakan publik adalah sebagaimana definisi yang dikemukakan oleh James Anderson (1969, dalam Winarno 2007: 18) yaitu “kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan”. Konsep kebijakan ini dianggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan oleh pemerintah.

Amir Santoso (1993, dalam Winarno (2007: 19), dengan mengkomparasi berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli yang menaruh minat dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan publik mengemukakan bahwa pada dasarnya pandangan mengenai kebijakan publik dapat dibagi ke dalam dua wilayah kategori yaitu:

Pertama, pendapat ahli yang menyamakan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan pemerintah. Para ahli dalam kelompok ini cenderung menganggap bahwa semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijakan publik. *Kedua*, menurut Amir Santoso berangkat dari para ahli yang memberikan perhatian khusus kepada pelaksanaan kebijakan. Para ahli yang masuk dalam kategori ini terbagi dalam dua kubu, kubu pertama melihat kebijakan publik dalam tiga lingkungan, yakni perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penilaian dan kubu kedua memandang kebijakan publik sebagai suatu hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibatakibat yang bisa diramalkan.

Lebih lanjut, Effendi dalam Syafiie (2006: 106) mengemukakan bahwa pengertian kebijakan publik dapat dirumuskan sebagai:

Pengetahuan tentang kebijakan publik adalah pengetahuan tentang sebab-sebab, konsekuensi dan kinerja kebijakan serta program publik, sedangkan pengetahuan dalam kebijakan publik adalah proses menyediakan informasi dan pengetahuan untuk para eksekutif, anggota legislatif, lembaga peradilan dan masyarakat umum yang berguna dalam proses perumusan kebijakan serta yang dapat meningkatkan kinerja kebijakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan definisi dan pendapat para ahli di atas, maka dapat dikemukakan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah ataupun pejabat pemerintah. Setiap kebijakan yang dibuat pemerintah pasti memiliki suatu tujuan, sehingga kebijakan publik berguna untuk memecahkan masalah atau problem yang ada dalam kehidupan masyarakat. Kebijakan publik sangat perlu adanya karena tugas pemerintah sebagai pelayan masyarakat yang harus merumuskan tindakan-tindakan untuk masyarakat.

2.1.1 Ciri-ciri kebijakan publik

Menurut Easton dalam Suharno (2013:14-15), ciri kebijakan publik yang utama yaitu yang disebut sebagai orang-orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik yang dalam kesehariannya terlibat dalam urusan-urusan politik dan dianggap oleh sebagian besar warga sebagai pihak yang bertanggung jawab atas urusan-urusan politik tadi dan berhak untuk mengambil tindakan-tindakan tertentu. Implikasi dari pernyataan diatas menyimpulkan bahwa ciri-ciri kebijakan publik adalah:

- a) Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik dalam sistem politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan.
- b) Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang bersangkutan-paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuan.

- c) Kebijakan bersangkutan-paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu.
- d) Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif. Dalam bentuk yang positif dapat mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mempengaruhi masalah tertentu. Sementara dalam bentuk yang negatif, kemungkinan meliputi keputusan pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun ketika campur tangan pemerintah sebenarnya diharapkan.

2.1.2 Proses kebijakan publik

Proses kebijakan publik dapat dikatakan sebagai proses yang dilakukan dalam rangka menyelesaikan suatu masalah-masalah publik. Proses kebijakan publik menurut Dunn dalam Suharno (2013:22-23) adalah sebagai berikut :

1) Penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu lama.

2) Formulasi Kebijakan

Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan dan tindakan legislatif.

3) Adopsi kebijakan

Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus di antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

4) Implementasi kebijakan

Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia.

5) Evaluasi/Penilaian kebijakan

Unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif dan peradilan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan.

Sedangkan Anderson dalam Suharno (2013:25-26), sebagai pakar kebijakan publik menetapkan proses kebijakan publik sebagai berikut:

1) Formulasi masalah (*problem formulation*)

Apa masalahnya? Apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan? Bagaimana masalah tersebut dapat masuk agenda pemerintahan.

2) Formulasi kebijakan (*formulation*)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah tersebut? siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan?

3) Penentuan kebijakan (*adaption*)

Bagaimana alternatif ditetapkan? Persyaratan atau kriteria seperti apa yang harus dipenuhi? Siapa yang akan melaksanakan kebijakan? Apa isi dari kebijakan yang telah ditetapkan?

4) Implementasi (*implementation*)

Siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? Apa dampak dari isi kebijakan?

5) Evaluasi (*evaluation*)

Bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuensi dari evaluasi kebijakan?

Adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan?

2.2 Konsep Implementasi

Menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah,

“Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the*

means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)” (Webster dalam Wahab, 2004:64).

Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut, “Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan” (Usman, 2002:70).

Menurut Guntur Setiawan dalam bukunya yang berjudul Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut: menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif (Setiawan, 2004:39). Pengertian implementasi yang dikemukakan oleh Setiawan tersebut dapat dikatakan bahwa implementasi yaitu merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya.

Menurut Hanifah Harsono dalam bukunya yang berjudul Implementasi Kebijakan dan Politik mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau

pelaksanaan sebagai berikut, “Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program” (Harsono, 2002:67).

Merilee S. Grindle dalam Nugroho mengatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh dua variabel yang fundamental, yakni isi kebijakaqn (*conten of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*), (Merilee S. Grindle dalam Nugroho 2003: h. 167)

1. Variabel isi kebijakan

Variabel isi kebijakan mencakup enam hal sebagai berikut, yaitu: (1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* memuat dalam isi kebijakan public, (2) jenis manfaat yang diterima oleh *target groups*, (3) sejauh man perbahan yang diinginkan oleh kebijakan, (4) apakah letak sebuah program sudah tepat, (5) apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, (6) sumber daya yang disebutkan apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.

2. Variabel lingkungan kehidupan

Variabel lingkungan kehidupan mencakup hal-hal sebagai berikut: (1) seberapa besar kekuatan , kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang bterlibat dalam implementasi kebijakan, (2) karakteristik lembaga dan penguasa, (3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok saasaran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.

2.3 Jaminan Sosial : Program Keluarga Harapan

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh Negara guna menjamin warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak, mencakup sebuah bidang dari kesejahteraan sosial yang memperhatikan perlindungan sosial, atau perlindungan terhadap kondisi sosial seperti kemiskinan, usia lanjut, kecacatan, pengangguran, keluarga, anak-anak dan lain-lain.

a. Pengertian Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) tidaklah sama dan bukan pula merupakan lanjutan program Program Subsidi/Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sudah berlangsung selama ini dalam rangka membantu rumah tangga miskin untuk mempertahankan daya beli pada saat pemerintah melakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyesuaian harga BBM. Program Keluarga Harapan (PKH) lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial penduduk miskin dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memotong mata rantai kemiskinan yang terjadi selama ini.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan yang termasuk dalam klaster pertama strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Program ini merupakan bantuan tunai bersyarat yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan dan kesehatan. Tujuan umum PKH adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengubah pandangan, sikap serta perilaku rumah tangga sangat miskin (RTSM) untuk lebih dapat mengakses layanan kesehatan dan pendidikan yang diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan.

Kesinambungan dari program ini akan berkontribusi dalam mempercepat pencapaian tujuan pembangunan milenium atau MDGs (*Millenium Development Goals*). Setidaknya ada lima komponen tujuan MDGs yang didukung melalui PKH, yaitu Penanggulangan kemiskinan ekstrim dan kelaparan, pencapaian pendidikan dasar untuk semua, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, pengurangan angka kematian anak, dan peningkatan kesehatan ibu.

Peserta PKH memiliki berbagai kewajiban yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum mendapatkan haknya, khususnya kewajiban yang terkait dengan kesehatan dan pendidikan. Kewajiban di bidang kesehatan berkaitan dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemeriksaan kesehatan, pemberian asupan gizi dan imunisasi anak balita sehingga dapat mengurangi angka kematian ibu dan angka kematian balita sesuai program prioritas dalam pencapaian indikator MDGs Di bidang pendidikan, peserta PKH memiliki kewajiban terkait dengan menyekolahkan anak ke sekolah dasar, lanjutan dan menengah (SD sampai dengan SMA) termasuk anak dengan disabilitas. Selain mendaftarkan peserta didik, peserta didik yang termasuk anggota PKH tersebut harus memenuhi jumlah kehadiran yang ditetapkan dalam program yaitu minimal 85% dari hari belajar efektif dalam sebulan, dengan demikian diharapkan kualitas pendidikan akan meningkat.

Program keluarga Harapan memberi manfaat jangka pendek dan juga jangka panjang. Untuk jangka pendek, Program Keluarga Harapan akan memberikan *income effect* kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga. Sedangkan untuk jangka panjang program ini diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan dan kapasitas pendapatan anak miskin di masa depan serta memberikan kepastian kepada si anak akan masa depannya kelak (*insurance effect*). Secara faktual dan menurut teori yang ada, tingkat kemiskinan suatu rumah tangga secara umum terkait dengan tingkat kesehatan dan pendidikan. Rendahnya penghasilan keluarga sangat miskin menyebabkan keluarga tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk tingkat rendah sekalipun. Pemeliharaan kesehatan ibu hamil pada keluarga sangat miskin sering tidak memadai sehingga menyebabkan buruknya kondisi kesehatan bayi yang dilahirkan dan bahkan berdampak pada tingginya kematian bayi.

Rendahnya kondisi kesehatan keluarga miskin juga berdampak pada tidak optimalnya proses tumbuh kembang anak, terutama pada usia 0-5 tahun. Pada tahun 2003 misalnya, angka kematian balita pada tingkat pedapatan terendah adalah 77% per 1000 kelahiran hidup, sementara pada kelompok penduduk berpendapatan tertinggihanya 22% per 1000 kelahiran hidup. Gizi kurang berdampak buruk pada produktivitas dan daya tahan tubuh seseorang sehingga menyebabkan kelompok ini terperangkap dalam siklus kesehatan yang buruk. Seringnya tidak masuk sekolah karena sakit dapat menyebarkan anak putus sekolah. Kondisi kesehatan dan gizi mereka yang buruk juga menyebabkan mereka tidak dapat berprestasi di sekolah.

Sebagian dari anak-anak keluarga sangat miskin, ada juga yang sama sekali tidak mengenyam bangku sekolah karena harus membantu mencari nafkah untuk keluarga. Meskipun angka partisipasi sekolah dasar tinggi, namun masih banyak anak yang putus sekolah atau tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan lanjutan (SMP/Mts) apalagi ke jenjang menengah atas (SMA). Kondisi ini menyebabkan kualitas generasi penerus keluarga miskin senantiasa rendah dan akhirnya terperangkap dalam lingkaran kemiskinan. Dari sudut pandang kebijakan,

PKH merupakan cikal bakal pengembangan sistem perlindungan sosial, khususnya bagi keluarga miskin. PKH yang mewajibkan RTSM memenuhi kewajibannya di bidang kesehatan dan pendidikan akan membawa perubahan perilaku RTSM/KSM terhadap pentingnya kesehatan dan pendidikan.

Pada akhirnya, implikasi positif dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan harus bisa dibuktikan secara empiris. Untuk itu, pelaksanaan PKH juga akan diikuti dengan kegiatan monitoring dan evaluasi. Program Keluarga Harapan merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang anggarannya bersumber dari APBN, dan melibatkan berbagai sektor yang didalamnya memerlukan kontribusi dan komitmen Kementerian/Lembaga meliputi: Bappenas, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, TNP2K, BPS dan Pemerintah Daerah serta Lembaga Keuangan dalam penyaluran bantuan bagi peserta PKH.

b. Kriteria penerima bantuan PKH

Peserta PKH adalah rumah tangga sangat miskin/keluarga sangat miskin (RTSM/KSM) yang sesuai dengan kriteria BPS dan memenuhi satu atau beberapa kriteria program, yaitu:

1. Memiliki ibu hamil/ibu nifas/anak balita.

2. Memiliki anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar (anak pra sekolah).
3. Memiliki anak SD/MI/Paket A/SDLB (usia 7-12 tahun).
4. Memiliki anak SMP/Mts/Paket B/SMLB (usia 12-15 tahun).
5. Memiliki anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar, termasuk anak dengan disabilitas.
- c. Dasar hukum PKH

Adapun dasar hukum Program Keluarga Harapan adalah:

1. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2010, tentang Kesejahteraan Sosial. Pasal 19: “Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan”.
2. Undang-Undang nomor 13 Tahun 2011, tentang Penanganan Fakir Miskin. Pasal 3: “Fakir miskin berhak memperoleh kecukupan pangan, sandang dan perumahan; memperoleh pelayanan kesehatan dan memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya.”, Pasal 15: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan penyediaan pelayanan kesehatan”, Pasal 16: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan bantuan biaya pendidikan atau beasiswa”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Pasal 12 ayat 2-4: “Pemberian bantuan langsung berkelanjutan diberikan dalam bentuk pemberian uang tunai atau pelayanan dalam panti sosial. Pemberian bantuan langsung berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Negara. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara serta jumlah pemberian uang tunai diatur dalam Peraturan Presiden”. Pasal 13: “Pemberian bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 2 dilaksanakan dengan menggunakan data yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
- Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Inpres nomor 3 tahun 2010, tentang Program Pembangunan yang berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.
- Inpres nomor 1 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) sebagai peserta Program Keluarga Harapan (Munawwarah Sahib. 2016 : 26).

2.4 Konsep Kemiskinan

Tjokrowinoto dalam Sulistiyani (2017:27) menyatakan bahwa kemiskinan tidak hanya menyangkut masalah kesejahteraan (*welfare*) semata, tetapi kemiskinan menyangkut persoalan kerentanan (*vulnerability*), ketidakberdayaan (*powerless*), tertutupnya akses kepada berbagai peluang kerja, menghabiskan sebagian besar penghasilannya untuk konsumsi, angka ketergantungan tinggi, rendahnya akses terhadap pasar, dan kemiskinan terefleksi dalam budaya kemiskinan yang diwarisi dari suatu generasi ke generasi berikutnya.

Lebih lanjut, Sulistiyani (2017:27-28) menyatakan bahwa kemiskinan merupakan kondisi yang jauh dari keadaan yang disebut sejahtera. Sejahtera merupakan kondisi dimana seseorang berada pada suatu kondisi telah mampu memenuhi kebutuhan diluar kebutuhan dasar.

Peneliti menyimpulkan, kemiskinan sebagai suatu kondisi seseorang maupun kelompok yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar kehidupannya, tidak dapat mengakses pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, sehingga jauh dari kehidupan sejahtera.

Kemiskinan telah menjadi momok yang kerap menghantui negara-negara berkembang dalam persaingannya untuk menjadi negara yang diakui maju. Ada berbagai pendapat mengenai kemiskinan, seperti:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Amartya Sen, pemenang hadiah Nobel di bidang ekonomi menyatakan bahwa orang disebut miskin karena mereka tidak bisa melakukan sesuatu, bukan karena mereka tidak memiliki sesuatu.
2. Yeni Salma Barlinti dalam tulisannya “Konsep Zakat dalam Sustainable Development: Suatu kajian Terhadap UU Pengelolaan Zakat” menyampaikan bahwa Miskin adalah suatu kondisi tidak mempunya seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
3. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) juga mengeluarkan pernyataan bahwa kemiskinan adalah suatu keadaan ketika seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri dengan taraf kehidupan yang dimiliki dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun fisiknya untuk memenuhi kebutuhannya.

2.5 Pandangan Islam tentang Program Keluarga Harapan

Dalam Islam jaminan sosial itu berarti, “tanggung jawab penjaminan yang harus dilaksanakan masyarakat muslim terhadap individu-individunya yang membutuhkan dengan cara menutupi kebutuhan mereka, dan berusaha merealisasikan kebutuhan mereka, memperhatikan mereka dan menghindarkan kebodohan dari mereka. Namun, harus diingat jika membahas takaful dalam Islam adalah bahwa takaful mencakup orang yang membutuhkan yang telah mengerahkan segala upayanya tetapi tidak bisa merealisasikan kecukupannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sehingga tidak ada yang beranggapan bahwa Islam mendukung para penganggur dan orang-orang yang malas bekerja.

Atas dasar tersebut, maka terminologi jaminan sosial mengandung beberapa makna, diantaranya adalah 1) keharusan, 2) tanggung jawab kolektif dalam penjaminan, baik dari individu terhadap individu, dari jamaah ke individu atau dari individu terhadap jamaah, 3) keluasan cakupannya terhadap semua sisi kehidupan, pendidikan dan pemeliharaan kesehatan. (Asmuni Shalihan Zamakhsyari, 2010:286)

Takaful merupakan tanggung jawab masing-masing individu, masyarakat dan pemerintah sebagaimana yang dijelaskan berikut ini: (Asmuni Shalihan Zamakhsyari, 2010:290-291)

1. Tanggung Jawab Individu

Ini adalah tanggung jawab individu yang diemban oleh seseorang yang mampu terhadap orang-orang yang membutuhkan dari orang-orang yang dia wajib nafkahi seperti kerabat dan orang sekitar mereka yang membutuhkan. Hal tersebut terkait dengan tolong-menolong yang disebutkan dalam hadist berikut :
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam Muslim (no. 2699)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا ، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا ، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا ، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak mengikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

بَيِّتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ ، وَيَتَذَكَّرُونَ سُنَّةَ بَيْنِهِمْ ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ ، وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ ، وَحَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ ، وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ (رواه مسلم)

Artinya : Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu , Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang Mukmin, maka Allâh melapangkan darinya satu kesusahan di hari Kiamat. Barangsiapa memudahkan (urusan) orang yang kesulitan (dalam masalah hutang), maka Allâh Azza wa Jalla memudahkan baginya (dari kesulitan) di dunia dan akhirat. Barangsiapa menutupi (aib) seorang Muslim, maka Allâh akan menutup (aib)nya di dunia dan akhirat. Allâh senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Barangsiapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allâh akan mudahkan baginya jalan menuju Surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allâh (masjid) untuk membaca Kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan ketenteraman akan turun atas mereka, rahmat meliputi mereka, Malaikat mengelilingi mereka, dan Allâh menyanjung mereka di tengah para Malaikat yang berada di sisi-Nya. Barangsiapa yang diperlambat oleh amalnya (dalam meraih derajat yang tinggi-red), maka garis keturunannya tidak bisa mempercepatnya.” (HR. Muslim No 2699)

Ini adalah yang terpenting dari hak-hak tersebut. Abu Hurairah radhiyallahu

’anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ، كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ الْقَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ (رواه البخارى و مسلم)

Artinya : Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu , Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda “Orang yang bekerja agar bisa memberi sebagian nafkah kepada janda, dan orang miskin, sebagaimana orang yang berjihad di jalan Allah, atau seperti orang yang tahajud di malam hari, puasa di siang hari.” (HR. Bukhari 5353 dan Muslim 2982).

Alquran QS. al-Maidah : 2 yaitu

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

2. Tanggung Jawab Masyarakat

Sesungguhnya hukum yang asal bahwa pemerintah mencerminkan masyarakat dalam merealisasikan jaminan sosial. Akan tetapi jika pemerintah tidak melaksanakan hal tersebut karena suatu sebab, maka manusia mengemban tanggung jawab tersebut secara langsung. Dimana tanggung jawab ini menjadi fardu kifayah.

3. Tanggung Jawab Pemerintah

Tanggung jawab ini adakalanya secara langsung, yaitu dengan merealisasikan kecukupan dari Baitul Mal terhadap orang-orang yang tidak mampu dan terkadang tidak langsung, yaitu dengan mewajibkan individu dan masyarakat untuk melaksanakan kewajiban terhadap orang yang membutuhkan. Salah satu kebijakan dalam hal jaminan sosial yang dilakukan di Indonesia adalah

Program Keluarga Harapan. Sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program bantuan Tunai Bersyarat (BTB) yang saat ini dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH) guna terlaksananya percepatan penanggulangan kemiskinan. Program Bantuan Tunai Bersyarat atau disebut *Conditional Cash Transfers (CCT)*, telah dilaksanakan di beberapa negara dan cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi oleh negaranegara yang melaksanakannya.

2.6 Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan untuk penelitian selanjutnya, sehingga peneliti dapat membandingkan hasil penelitiannya. Penelitian terdahulu dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kajian Terdahulu

Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
Eni Ardianti (2017)	Implementasi program keluarga harapan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kecamatan Bukit Bestari kota	Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan belum berjalan secara maksimal. Sosialisasi belum dilakukan secara menyeluruh, proses pengawasan dan pendampingan	Ada pun perbedaan dalam penelitian ini adalah dimana peneliti sebelumnya hanya permasalahan jumlah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak mengikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Tanjung Pinang	masyarakat belum dilakukan secara optimal karena tidak didukung dengan jumlah pendamping yang memadai.	pendamping yang belum memadai, Tempat penelitian dan teori penelitian
Munawwarah Sahib(2016)	Pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa	pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di kecamatan Bajeng kabupaten Gowa berjalan dengan sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan skor rata-rata yang di dapatkan dari item pertanyaan sebesar 224 atau sebesar 82,6% yang menandakan bahwa Program Keluarga Harapan dalam pelaksanaannya menempati kategori sangat tinggi/sangat baik dan dengan melihat kenyataan dilapangan ditemukan bahwa Program	Didalam penelitian ini, peneliti hanya meneliti tentang pelaksanaan program PKH hanya menurut pandangan islam dan prinsip Ekonomi Islam, Tempat penelitian dan teori penelitian,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		keluarga Harapan sesuai dengan prinsip tauhid, prinsip keseimbangan, prinsip khilafah dan prinsip keadilan yang terdapat dalam Prinsip Ekonomi Islam.	
Cita Fauziatul Akmalah (2017)	Implementasi program keluarga harapan di Kelurahan Krangan Kabupaten Temanggung	Implementasi program keluarga harapan sudah berjalan dengan baik kecuali verifikasi komponen kesejahteraan sosial belum berjalan.	Dalam penelitian ini, peneliti hanya meneliti dengan konsep kesejahteraan dan melihat hanya dari perbandingan sosial masyarakat Tempat penelitian dan teori penelitian

2.7 Definisi konsep

- kebijakan publik merupakan tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah ataupun pejabat pemerintah. Setiap kebijakan yang dibuat pemerintah pasti memiliki suatu tujuan, sehingga kebijakan publik berguna untuk memecahkan masalah atau problem yang ada dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan masyarakat. Kebijakan publik sangat perlu adanya karena tugas pemerintah sebagai pelayan masyarakat yang harus merumuskan tindakantindakan untuk masyarakat.

2. Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program
3. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan yang termasuk dalam klaster pertama strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Program ini merupakan bantuan tunai bersyarat yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan dan kesehatan. Tujuan umum PKH adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengubah pandangan, sikap serta perilaku rumah tangga sangat miskin (RTSM) untuk lebih dapat mengakses layanan kesehatan dan pendidikan yang diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan.
4. kemiskinan merupakan kondisi yang jauh dari keadaan yang disebut sejahtera. Sejahtera merupakan kondisi dimana seseorang berada pada suatu kondisi telah mampu memenuhi kebutuhan diluar kebutuhan dasar.

2.8 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah unsur yang memberikan bagaimana cara mengukur suatu variabel sehingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisis dari variabel tersebut.

Berdasarkan Pedoman Umum Tentang Program Keluarga Harapan, maka peneliti menggunakan indikator – indikator untuk melakukan pengukuran kebijakan Program Keluarga Harapan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Penelitian

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Kebijakan Program Keluarga Harapan	Tugas Pelayan Uang Tunai	1. Memberikan pelayanan bantuan Uang tunai Bagi Peserta Program Keluarga Harapan dalam RTSM/KSM 2. Bersama pendamping PKH dan menyelesaikan masalah- masalah pelayanan bantuan uang tunai
	Tugas pelayanan Kesehatan	1. Memberikan pelayanan kesehatan Bagi Peserta PKH (Ibu hamil/nifas, Balita) Sesuai Protokol Kesehatan. 2. Bersama Pendamping PKH Memotivasi Peserta PKH untuk memenuhi Protokol kesehatan serta membahas dan menyelesaikan masalah-masalah dalam pelayanan kesehatan. 3. Memberikan data kehadiran peserta PKH di pelayanan kesehatan (Puskesmas, Posyandu dsb) kepada pendamping PKH
	Tugas Pelayanan pendidikan	untuk mengisi formulir verifikasi Kesehatan. 4. Pemberi layanan kesehatan menandatangani keabsahan formulir

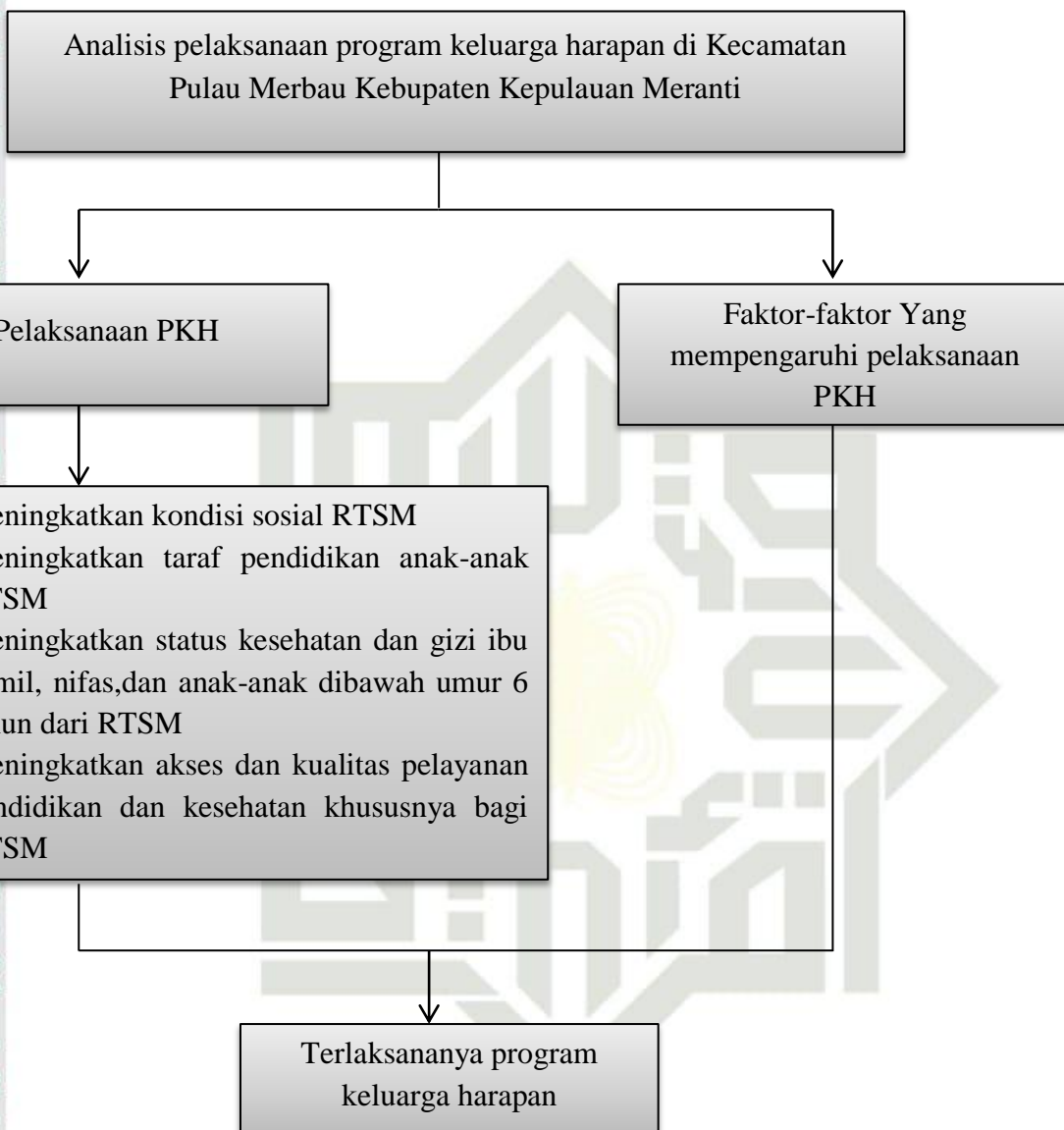
		<p>verifikasi kesehatan yang diisi oleh pendamping PKH</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pelayanan pendidikan bagi anak peserta PKH (SD,SMP Sederajat dan kesetaraan) 2. Bersama pendamping PKH memotivasi peserta PKH agar anak-anaknya memenuhi ketentuan pendidikan serta membahas dan menyelesaikan masalah-masalah dalam pelayanan pendidikan 3. Memberikan data kehadiran anak peserta PKH disekolah (formal, Informal, non-formal) kepada pendamping PKH untuk pengisian formulir verifikasi pendidikan. 4. Pemberi layanan pendidikan menandatangani keabsahan formulir verifikasi pendidikan yang diisi oleh pendamping PKH.
--	--	--

Sumber: Pedoman umum program keluarga harapan (PKH)

2.9 Kerangka Befikir

Kerangka pemikiran ini dimaksud untuk memberikan gambaran-gambaran atau batasan-batasan tentang teori yang digunakan penelitian sebagai landasan pemahaman tentang penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran yang peneliti lakukan di jelaskan dalam bentuk bagan-bagan, yang dapat memudahkan pemahaman tentang tata cara dan proses dalam melakukan pengawasan tersebut. Adapun kerangka pemikiran adalah:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk mencari unsur-unsur, ciri-ciri, sifat-sifat suatu fenomena. Metode ini dimulai dengan mengumpulkan data, menganalisis data dan menginterpretasikannya (Suryana, 2010). Jenis data dan analisisnya yaitu data kualitatif yang merupakan data berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar (Sugiono, 2011:14).

Sementara menurut moleong dalam (Kiki Debi Sinta, 2016) peneliti kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang terjadi pada subjek penelitian misalnya: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Dan menurut Sarosa penelitian kualitatif adalah penelitian yang mencoba memahami fenomena dalam setting dan konteks naturalnya bukan di dalam laboratorium dan peneliti tidak berusaha untuk memanipulasi fenomena yang diamati.

Penelitian kualitatif diskriptif adalah suatu penelitian yang menggunakan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati, sehingga bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara sistematis dalam memperlakukan kelompok yang berkebutuhan

khusus/ disabilitas sebagai mana hak-hak mereka yang telah dijamin oleh undang-undang.

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018 dengan pengambilan data tahun 2017-2018. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

a. Data Primer

Yaitu data yang dikumpulkan dan diperoleh melalui pengamatan langsung ditempat penelitian dengan mengambil data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, yaitu berupa Tanya jawab langsung (wawancara), dan observasi langsung dengan Pendamping Program Keluarga Harapan, Ketua PKH, dan Masyarakat Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai *principal*.

b. Data Skunder

Yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, hal ini diperoleh dari berbagai sumber baik berupa laporan, maupun informasi dari pihak terkait.

3.4 Subjek Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sabjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Sebagaimana dijelaskan oleh Arikanto (2013 : 145) sabjek penelitian adalah sabjek yang dituju untuk diikuti oleh peneliti. Jadi, sabjek penelitian itu merupakan sumber informasi yang digali untuk mengungkap fakta-fakta dilapangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka sabjek penelitian digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan secara jelas dan mendalam.

Selanjutnya penentuan sabjek penelitian atau responden yang dianggap sebagai *key informant* dilakukan dengan cara yaitu *purposive sampling*. Alasan penulis menggunakan dua teknik tersebut karena sumber *informant* dalam penelitian ini terbagi dua pihak yaitu unit pelaksanaan PKH (UPPKH) Kec. Pulau Merbau dan masyarakat yang merupakan rumah tangga sangat miskin (RTSM/KSM)

Dalam penelitian ini istilah yang digunakan untuk subjek penelitian adalah informan. Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah Pendaping Program Keluarga Harapan, Ketua PKH, dan pihak yang kompeten dalam Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Desa Renak Dungun Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.

Teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tertentu yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Sehingga akan

memudahkan peneliti dalam menelusuri situasi yang diteliti Sugiyono (2016:85),
sajek penelitian dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.1
Sabjek penelitian

No	Jabatan	Katagori
1	Koordinator UPPKH kec. Pulau Merbau	1
2	Pendamping PKH Kec. Pulau Merbau	2
3	Peserta PKH	7

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi lapangan, studi kepustakaan, Dokumentasi, wawancara, dan Kuisisioner.

a. Observasi

Teknik utama pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik observasi (sumber data primer). Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, peneliti berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. (Sugiono, 2011:166).

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedang diteliti. Informasi tersebut diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis, dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data lain yang digunakan untuk menunjang teknik observasi selain wawancara yaitu dokumentasi (sumber data skunder). Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, langger, agenda dan sebagainya.

d. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk menunjang teknik observasi dalam penelitian ini adalah wawancara (sumber data sekunder). Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah responden sedikit/kecil (sugiyono, 2011:157). Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mengungkapkan kelebihan dan kesulitan dalam penerapan pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah.

3.6 Analisis Data

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini menggunakan prosedur analisis data kualitatif model miles dan huberman dalam (Kiki Debi Sinta, 2016). Terdapat tiga macam kegiatan analisis data kualitatif, yaitu :

a. Reduksi data

Data yang diperoleh dari lokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. Laporan lapangan oleh peneliti direduksi, dirangkum dan dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting dan kemudian dicari polanya. Selama tahap pengumpulan data berlangsung dilakukan tahap data, selanjutnya dengan cara membuat ringkasan, pengkodean, menelusuri pola, membuat gugus-gugus dan menulis memorandum teoritis. Reduksi data dalam penelitian ini adalah dengan memilih data-data yang telah diperoleh di lapangan yang mendukung topik penelitian seperti Laporan Penyelenggaraan dan Pertanggungjawaban PKH Wawancara dan kuisioner.

b. Penyajian Data

Penyajian data bertujuan memudahkan peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Data dapat disajikan dalam bentuk matriks, peta atau uraian naratif. Pada penelitian ini penyajian data berupa uraian naratif perbandingan antara pelaksanaan di lapangan dengan peraturan perundang-undangan tentang Program Keluarga Harapan.

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Verifikasi data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung. Sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, penelitian berusaha menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan dengan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, dan yang dituangkan dalam kesimpulan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1. Kondisi Geografis

Lokasi penelitian dalam sebuah penelitian merupakan tempat dimana sebuah penelitian dilakukan, adapun lokasi penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini yaitu Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kecamatan Pulau Merbau merupakan pulau yang berada ditengah-tengah diantara Pulau Ransang, Pulau Tebing Tinggi, Pulau Padang dan berhadapan dengan Selat Malaka. Terletak pada Koordinat **010 00⁰ 783 LU 102⁰ 350 07⁰ BT** dengan Ibukota Kecamatan Semukut, Jarak Ibukota Kecamatan Pulau Merbau, Semukut ke Ibu Kota Kabupaten, Selatpanjang ± 25 Km, dan ke Ibu Kota Propinsi Riau, Pekanbaru ± 250 Km. Kecamatan Pula Merbau dibagi menjadi 11 wilayah Desa, yaitu:

1. Desa Semukut
2. Desa Padang Kamal
3. Desa Teluk Ketapang
4. Desa Ketapang Permai
5. Desa Batang Meranti
6. Desa Centai
7. Desa Tanjung Bunga

8. Desa Kuala Merbau
9. Desa Renak Dungun
10. Desa Baran Merlintang
11. Desa Pangkalan Balai

Kecamatan Pulau Merbau merupakan salah satu bagian dari kabupaten Kepulauan Mernati yang berbatasan dengan beberapa Kecamatan lain yang masih dalam satu Kabupaten. Adapun Secara Administrasi batas-batas wilayah Kecamatan Pulau Merbau adalah :

Sebelah Utara : Selat Malaka (Malaysia)

Sebelah Selatan : Selat Rengit

Sebelah Timur : Selat Air Hitam

Sebelah Barat : Selat Asam

4.2. Keadaan Demografis

Jumlah sekolah yang berada dikecamatan Pulau Merbau adalah sebagai berikut :

Tabel. 4.1
Jumlah siswa dan sekolah kecamatan Pulau Merbau

No	Tingkat	Jumlah Siswa	Jumlah Sekolah
1	2	3	4
1	PAUD	533	13
2	TK	73	3

3	SD	2063	16
4	MI	-	4
5	SMP	447	3
6	MTs	61	3
7	SMA	449	3
8	SMK	27	1
9	MA	122	3
Total			

Sumber : Unit pelaksanaan PKH (UPPKH) Kec. Pulau Merbau

4.3 Kondisi Sosial dan Ekonomi

Mengetahui keadaan sosial ekonomi suatu wilayah sangat penting, agar kita mengetahui berbagai potensi yang dimiliki wilayah tersebut. Selain itu bagi pihak pemerintah sendirinya dapat dijadikan dasar guna menyusun kebijaksanaan pemerintah setempat. Masing-masing aspek sosial dan ekonomi suatu daerah pada hakikatnya menunjukkan tingkat keberhasilan dan kemajuan daerahnya di dalam melaksanakan pembangunan.

Adapun keadaan sosial dan ekonomi di wilayah Kecamatan Pulau Merbau dapat dijelaskan sebagai berikut Sebagian besar penduduk di Kecamatan Pulau Merbau sesuai potensi dan kondisi wilayah mayoritas mata pencaharian penduduk adalah sebagai petani Karet (60 %), petani kelapa (5 %), dan petani sagu (15 %), pedagang (10 %), karyawan baik pemerintah maupun swasta (2 %), dan nelayan (5 %) dll (3 %).

Keberadaan perkebunan sagu, perkebunan kelapa, dan perkebunan karet di beberapa desa sedikit terhambat dalam hal pemasaran hasil perkebunan untuk

mendongkrak ekonomi warga desa, disebabkan permasalahan sarana jalan.

Adapun perkiraan produksi perkebunan dimaksud sebagai berikut :

Tabel 4.2

Penghasilan pertanian masyarakat Kec. Pulau Merbau

No	Nama Perkebunan	Hasil Produksi Per tahun	Keterangan
1	Karet	27000 ton	2.567 ha
2	Sagu	7.209 ton	1.075 ha
3	Kelapa	90 ton	51 ha

Sumber : Unit pelaksanaan PKH (UPPKH) Kec. Pulau Merbau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi pada pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Implementasi PKH di Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti adalah:

1. Mengenai pengetahuan dan sosialisasi Program PKH yang dilakukan oleh Petugas/pendamping di PKH Kecamatan Pulau Merbau, hanya dilakukan antara Penerima Program PKH dan Petugasnya, Dengan pejabat kecamatan dan pejabat RT juga tidak dilakukan dengan baik. Sehingga *stakeholders* pendukung program PKH telah mendukung sepenuhnya.
2. Pendampingan yang dilakukan oleh Pendamping atau Petugas PKH dilakukan dengan baik. Proses pendampingan dilakukan kunjungan ke rumah peserta PKH sebagai upaya memastikan perkembangan dari target tujuan program PKH. Pertemuan bulanan dengan ketua kelompok dan seluruh peserta PKH juga dilakukan. petugas PKH, sehingga pendamping juga telah memberikan motivasi kepada peserta PKH dalam menjalankan komitmennya.
3. Proses pendistribusian dana PKH kepada penerima PKH atau RTSM,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan oleh penerima bantuan PKH dengan dibantu oleh Ketua kelompok PKH.

4. Bentuk program PKH di Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti adalah:

a. Program bidang kesehatan, jenis program ini adalah untuk meningkatkan jangkauan atau aksesibilitas masyarakat yang tidak mampu terhadap pelayanan kesehatan. Peserta PKH dikenakan persyaratan kesehatan adalah peserta yang memiliki ibu hamil/nifas, anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD. Untuk bidang kesehatan ini telah berjalan dengan baik dengan didampingi oleh pendamping PKH.

b. Program PKH bidang pendidikan diberlakukan pada peserta PKH yang memiliki anak usia 7-15 tahun diwajibkan untuk didaftarkan/terdaftar pada lembaga pendidikan dasar (SD/MI/SMP/MTs/SMA/SMK). Dalam implementasi bidang pendidikan pada PKH di Kecamatan Pulau Merbau sudah berjalan dengan baik, pendamping PKH melakukan sosialisasi kesetiap sekolah yang ada dikecamatan pulau merbau untuk memotifasi setiap siswa dan orang tua penerima PKH.

c. Kondisi RTSM di Kecamatan Pulau Merbau sejak diimplementasikannya PKH di Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepulauan Meranti. Secara perubahan yang dirasakan oleh Peserta Program PKH setelah mereka mendapatkan program tersebut terlihat sangat dirasakan manfaatnya, baik dari akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan maupun pelayanan pendidikan. Meski demikian, untuk jangka panjang Program PKH, yang diharapkan belum terjadi perubahan signifikan terutama pada pola pikir dan perilaku serta kesinambungan terhadap perbaikan kehidupan RTSM. Seperti kesehatan ibu hamil, balita serta tingkat pendidikan anak-anak RTSM/KSM, belum bisa terlihat. Sehingga Program PKH yang bisa memutus rantai kemiskinan yang ada di Kecamatan Wanasalam belum bisa dilihat dengan nyata.

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi PKH di Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.

- a. Faktor mendukung implementasi PKH dikecamatan Pulau Merbau adalah pendamping memiliki kecakapan dalam melakukan tugas sebagai pendamping sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan pedoman pelaksanaan program keluarga harapan (PKH). bekerja sesuai dengan ketentuan atau SOP bagi seorang pendamping PKH, sangat diperlukan agar program pengurangan kemiskinan melalui Program PKH dapat berjalan dengan yang diharapkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Faktor penghambat pelaksanaan PKH ini adalah kurangnya pengetahuan penerima bantuan tentang PKH terutama kepada keluarga penerima bantuan PKH sehingga dana yang dikeluarkan pemerintah tidak dipergunakan dengan semestinya. Dalam Distribusi Uang tunai Program PKH, kepada KPM PKH di harapkan dapat digunakan sepenuhnya untuk pemenuhan dan keperluan kebutuhan kpm PKH, tetapi pengecekan di lapangan tidak memungkinkan karna, kontrol langsung dari Pendamping tidak sepenuhnya ada, karna distribusi bantuan uang tunai langsung di beri kepada KPM PKH,

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang direkomendasikan peneliti sebagai bahan evaluasi dan masukan baik untuk pengembangan pengayaan teori maupun kebutuhan praktis guna mendukung program PKH khususnya di Kecamatan Pulau Merbau adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan evaluasi pada kinerja pendamping, agar terjadi perbaikan pendampingan secara konsisiten dan inovatif. Perlu adanya pelatihan pemberdayaan kepada pendamping agar lebih siap melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pendamping yang professional. Sehingga bisa mengentaskan kemiskinan di masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai tujuan program PKH.

Tim pendamping atau petugas PKH perlu melakukan pengawasan dan pemahaman kepada RTSM agar dana tunai yang diterima dari program PKH bisa digunakan sesuai ketentuan PKH. Baik untuk perbaikan kualitas pendidikan maupun kesehatan peserta PKH. Para *stakeholders* harus turut serta untuk mengawasi dan mendorong implementasi PKH berjalan baik.

Selain itu, perlu juga dilibatkan pihak swasta guna mendukung sarana dan prasarana dari dana-dana CSR (*corporate resposnsiblity*) agar terwujud kesatuan sebagai bentuk kebersamaan dalam mengentaskan fenomena kemiskinan yang berkembang, khususnya di Kecamatan Pulau Merbau dan umumnya di Kabupaten Kepulauan Meranti serta Indonesia secara luas.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: IAPI.
- Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara (Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance)*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Cita, 2017. "Implementasi Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung". *Skripsi*. Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Dedy Utomo Dkk. 2013. "Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin (Studi pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri) *Jurnal Volume 2 No. 1 ISSN 1979-6471*. Malang : Universitas Brawijaya.
- Harsono, Hanifah. 2002. *Implementasi Kebijakan dan Politik*: Rinheka Karsa. Yogyakarta.
- Hutasoit. 2011. *Pelayanan Publik*. Jakarta Timur. MAGNA Script Publising. Cetak I
- Inu Kencana Syafii. 2010. *Ilmu Administrasi publik*. Jakarta. PT Asdi Mahasatya
- Jaribah al-Haritsi, *al-Fiqh al-Iqtishadi li Amirul Mukminin Umar Ibnu al-Khaththab* diterj. oleh Asmuni Shalihan Zamakhsyari. 2010, *Fikih Ekonomi Umar Ibnu al-Khatthab* (Cet. 3; Khalifa, Jakarta Timur)
- Kurniawan. 2005. *Tranformasi Pelayanan Publik*. Intermedia
- Rafiudin, Muhammad, 2016. "Implementasi program keluarga harapan dikecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak" *Skripsi*. Banten : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Panduan Umum PKH* oleh Kementrian Sosial RI Tahun 2013 dan Tahun 2016
- Pasolong, Harbani. 2013. *Teori Administrasi Pubik*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis: Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta. Cetak XVI



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharto, Ph. Edi. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.

Suharno. 2013. *Dasar-dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis Kebijakan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Syahputra Dkk. 2016. "Program Keluarga Harapan (PKH): Antara Perlindungan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan". *Jurnal Volume No. 2 ISSN 2442-4480*. Jawa Barat : Universitas Padjadjaran

Tri Setiani. 2014. "Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Serba Jadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya" *Skripsi*. Aceh : Universitas Teuku Umar Maulaboh.

Wahyudi Kumorotomo. 2014. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta. Rajawali Pers

SUMBER LAIN

Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 2 dan terjemahannya

Al-Ahâdîts ash-Shahîhah. Shahîh: (HR. Muslim No 2699)

Al-Ahâdîts ash-Shahîhah. Shahîh: (HR. Bukhari 5353 dan Muslim 2982).

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DRAFT WAWANCARA

Pertanyaan :

A. Pelaksanaan PKH

1. Bagaimana pendapat mengenai pelaksanaan PKH.?
2. Seperti apa proses pendataan peserta awal PKH.?
3. Bagaimana sosialisasi program PKH.?
4. Bagaimana pendampingan yang dilakukan petugas PKH kepada peserta PKH.?
5. Apa saja program PKH untuk RTSM.?
6. Faktor-faktor apa saja yang memperlancar pelaksanaan PKH di Kecamatan Pulau Merbau.?
7. Faktor-faktor apa saja yang menghambat kegiatan pelaksanaan PKH dikecamatan Pulau Merbau.?

B. Pelayanan Uang tunai

1. Bagaimana proses pencairan dan kepada RTSM atau peserta PKH? Dan digunakan apa saja dana tersebut oleh peserta PKH.?
2. Perubahan apa saja yang dirasakan setelah mendapatkan Program PKH.?

C. Pelayanan kesehatan.

1. Bagaimana kegiatan posyandu atau kesehatan para peserta PKH.?
2. Bagaimana proses kegiatan yang dilakukan pendamping PKH dalam pemeriksaan kesehatan peserta PKH.?

D. Pelayanan Pendidikan.

1. Bagaimana kegiatan pendidikan para peserta PKH.?
2. Bagaimana sistem pelaksanaan PKH dalam meningkatkan taraf pendidikan peserta PKH.?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DRAFT WAWANCARA

PESERTA PROGRAM KELUARGA HARAPAN

Pertanyaan :

1. Bagaimana pengetahuan umum tentang PKH.?
2. Seperti apa proses pendataan peserta awal PKH.?
3. Bagaimana sosialisasi program PKH.?
4. Bagaimana pendampingan yang dilakukan petugas PKH kepada peserta PKH.?
5. Apa saja program PKH untuk RTSM.?
6. Bagaimana kegiatan posyandu atau kesehatan para peserta PKH.?
7. Bagaimana kegiatan pendidikan para peserta PKH.?
8. Bagaimana proses pencairan dan kepada RTSM atau peserta PKH? Dan digunakan apa saja dana tersebut oleh peserta PKH.?
9. Perubahan apa saja yang dirasakan setelah mendapatkan Program PKH.?
10. Faktor-faktor apa saja yang memperlancar pelaksanaan PKH di Kecamatan Pulau Merbau.?
11. Faktor-faktor apa saja yang menghambat kegiatan pelaksanaan PKH di kecamatan Pulau Merbau.?
12. Bagaimana upaya penyelesaian masalah dalam pelaksanaan PKH di Kecamatan Pulau Merbau.?

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Koordinator PKH Bapak Erizal



Wawancara Pendamping PKH Ibu Yuyu Winarni

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan pendamping PKH Ibuk Lili Herawati



Wawancara dengan penerima PKH Ibu Kamariah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Penerima PKH Ibuk Zubaidah



Wawancara penerima PKH Ibuk Julia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara penerima PKH Ibu Suryani



Wawancara penerima PKH Ibu Railah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara penerima PKH Ibuk Miza Wati



Wawancara penerima PKH Zura



SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/7473/2018 Pekanbaru, 14 Desember 2018 M
 Sifat : Biasa 5 Rabiul Akhir 1440 H
 Lampiran : -
 Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada
 Yth. **Abdiana Ilosa, S.AP, MPA**
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

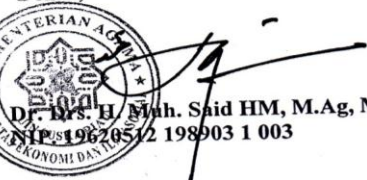
Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Rafizar
 NIM : 11475104863
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : IX (Sembilan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Hrs. H. Mah. Said HM, M.Ag, MM
 NIP. 19620512 198903 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/7474/2018
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 14 Desember 2018 M
5 Rabiul Akhir 1440 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Rafizar
NIM. : 11475104863
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : IX (Sembilan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Kecamatan Pulau
Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti" Untuk itu kami mohon kiranya
Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa
tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Drs. H. Muli. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id Kode Pos : 28126

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/16602
T E N T A N G



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : 04/F.VII/PP.00.9/7474/2018 Tanggal 14 Desember 2018**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | RAFIZAR |
| 2. NIM / KTP | : | 11475104863 |
| 3. Program Studi | : | ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN KECAMATAN PULAU MERBAU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI |
| 7. Lokasi Penelitian | : | UNIT PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN KECAMATAN PULAU MERBAU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI |

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 17 Desember 2018



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

Penyampaian :

Penyampaian Kepada Yth :

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
Bupati Kepulauan Meranti
Up. Kepala DPMTSP dan Tenaga Kerja di Selatpanjang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ultan Syarif Kasim Riau

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
 Jalan Johari Dagang Komplek Perkantoran Bupati, Telp/ Fax. (0763) 33630
 E-Mail : dpmpstpkmeranti@gmail.com
SELATPANJANG Kode Pos 28753

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 000/DPMPTSP/KXII/2018/SKP/064

TENTANG :

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti, setelah membaca surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/16602 Tanggal 17 Desember 2018, dengan ini memberikan rekomendasi penelitian kepada :

Nama : **RAFIZAR**
 NIM : **11475104863**
 Program Studi : **ADMINISTRASI NEGARA**
 Jenjang : **S1**
 Alamat : **PEKANBARU**
 Judul Penelitian : **ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN
 KECAMATAN PULAU MERBAU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**
 Lokasi Penelitian : **UNIT PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN KECAMATAN
 PULAU MERBAU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaannya kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini diberikan, agar dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini terima kasih.

Dibuat di : **Selatpanjang**
 Pada tanggal : **26 Desember 2018**

a.n. **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 DAN TENAGA KERJA
 KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

Drs. REVIRIANTO
 Pembina Utama Muda (IV/C)
 NIP. 19611121 199103 1 002

Disampaikan Kepada Yth :
 Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti;
 Unit Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti;
 dan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor :000/UPPKH/PM/Ket-Riset/III/2019/001

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Erizal S.Pd
Jabatan : Koordinator UPPKH Kecamatan Pulau Merbau

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rafizar
Nim : 11475104863
Program study : Administrasi Negara
Jenjang : S1
Perguruan Tinggi : UIN Suska Riau
Alamat : Pekanbaru
Untuk : mengadakan penelitian dengan judul Analisis Pelaksanaan Program keluarga harapan Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti

Berdasarkan surat dari dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja Nomor 000/DPMPTSPK/XII/2018/SKP/064 tanggal 26desember 2018, telah melaksanakan penelitian mulai tanggal rekomendasi surat tersebut pada UPPKH kecamatan Pulau Merbau .

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pulau Merbau 17 April 2019

UPPKH Kecamatan Pulau Merbau



Erizal S.Pd



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Rafizar Bin Syamsu Bin Karim, lahir di Renak Dungun Kabupaten Kepulauan Meranti Kecamatan Pulau Merbau pada tanggal 16 Februari 1995, merupakan anak Keempat dari delapan bersaudara. Lahir dari pasangan Syamsu dan Railah.

Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 018 Renak Dungun, Madrasah Diniyah Awaliyah Nurul Iman Renak Dungun yang tamat pada tahun 2007, kemudian melanjutkan kembali ke Madrasah Tsanawiyah Darul Ihsan (MTs DI) Teluk Belitung tamat pada tahun 2011, Kemudian melanjutkan kembali ke Madrasah Aliyah Darul Ihsan (MA DI) Teluk Belitung dan tamat pada tahun 2014, lalu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) mengambil Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada tahun 2014 dan menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada tahun 2019.

UIN SUSKA RIAU